

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU LINTAS
DI JALAN SURYAKENCANA KOTA BOGOR**

*THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NO. 4 OF 2012 ON PUBLIC
SERVICE LEVIES IN THE FRAMEWORK ORDER CREATING TRAFFIC ON THE ROAD
SURYAKENCANA CITY OF BOGOR.*

**Disusun Oleh :
Harry Rudyantoro
Ujang Bahar
Mulyadi**

ABSTRACT

Related to the implementation of the Regional Regulation (Perda) about the increase in parking rates at the edge of the road prone to congestion in the city of Bogor ratified and entered into force on July 2, 2012, The first location that imposed this tariff is the Way Suryakencana and Jalan Siliwangi Bogor and the second location is the application of The Government through the Department trials Traffic Transportation (DLLAJ) Bogor City gets a reaction from the people around Jalan Suryakencana. Enactment of the increase in parking rates at Jalan Bogor Suryakencana expected to reduce illegal parking of vehicles in the area, which has been causing congestion. With parking rates that have been enacted many road users who park their vehicles in multiple and indiscriminate.

The method used in this study is empirical juridical approach. The study, based on an inventory of positive law, the discovery of the principles of law and legal discovery inconcretto, which include observation of empirical operationalization of law in society.

The conclusion from this study is the basis of the application of the levy Parking Services Bank Public Road, especially in the city of Bogor is Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies and Regional Regulation No. 4 of 2012. Implementation of Regional Regulation No. 4 of 2012 on Increase Rates Parking is not yet fully effective this is due to high payments also has not been matched with adequate services, the responsibility for the damage and loss still be a burden for the owner of the vehicle so that the functions and responsibilities of the government that deal with parking problems is questionable. Impact parking tariff policy to demand that any increase in the parking rate of 10 percent would result in a decrease in the use of parking of 0.7 -0.8 percent, increase use of public transport and cycling amounted to 3.71 percent of 0.9 percent. This figure is even greater in the short term, when applied can lead to a new increase in the elasticity to be about - 0.28., Where the parking lot reducing the length of parking time and reduce the amount of parking.

Keywords: Regional Regulation, Rates Parking, Traffic Order

ABSTRAK

Terkait pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum di tepi jalan yang rawan kemacetan di Kota Bogor yang disahkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Juli 2012, Lokasi pertama yang diberlakukan tarif ini adalah Jalan Suryakencana dan Jalan Siliwangi Kota Bogor dan kedua lokasi ini merupakan pemberlakuan uji coba Pemerintah melalui Dinas

Lalu lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor mendapat reaksi dari masyarakat sekitar Jalan Suryakencana. Diberlakukannya Retribusi Jasa Umum di Jalan Suryakencana Kota Bogor diharapkan dapat mengurangi kendaraan yang parkir liar di area tersebut, yang selama ini menimbulkan kemacetan. Dengan tarif parkir yang selama ini diberlakukan banyak pengguna jalan raya yang memarkir kendaraannya secara ganda dan sembarangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *inconcreto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dasar penerapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum khususnya di Kota Bogor adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum belum sepenuhnya efektif hal ini dikarenakan adanya pembayaran yang tinggi juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Dampak kebijakan tarif parkir terhadap demand bahwa setiap peningkatan tarif parkir sebesar 10 persen akan mengakibatkan penurunan penggunaan parkir sebesar 0,7 -0,8 persen, meningkatkan penggunaan angkutan umum sebesar 3,71 persen dan bersepeda sebesar 0,9 persen. Angka ini lebih besar lagi untuk jangka pendek, pada saat kenaikan baru diterapkan dapat mengakibatkan elastisitas menjadi sekitar - 0,28., dimana pengguna tempat parkir mengurangi lama waktu parkir dan mengurangi jumlah parkir.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Tarif Parkir, Ketertiban Lalu Lintas.